

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. *Pertama* adalah demokrasi liberal atau parlementer di masa awal kemerdekaan. *Kedua* adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. *Ketiga* adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. *Keempat* adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.

Demokrasi parlementer yang berlaku pada periode (1945-1959) ternyata belum bisa memberikan perubahan berarti bagi Indonesia. Demokrasi parlementer yang dikemudian hari disebut sebagai demokrasi liberal karena rakyat benar-benar diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berpolitik bahkan untuk membentuk partai sekalipun. Juga pada waktu demokrasi liberal setiap anggota kabinet berhak mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dan oleh presiden Soekarno demokrasi ini dianggap sebagai demokrasi cara Barat karena menimbulkan perpecahan nasional, akhirnya diganti dengan demokrasi terpimpin.

Sementara demokrasi Pancasila yang lahir setelah tumbangya demokrasi terpimpin dan dimulainya Orde Baru tahun 1966. Oleh rezim Orde Baru demokrasi Pancasila ini dianggap sebagai koreksi total terhadap sistem-sistem

demokrasi yang “menyimpang” dalam masa-masa sebelumnya. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasangan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini.

Di sisi lain, situasi politik selama 32 tahun di bawah rezim Demokrasi Pancasila, rakyat semakin merasa hak-hak politiknya dipasung. Pemberlakuan Undang-undang Anti Subversi dan pembatasan kebebasan pers yang terlalu ketat telah dirasakan menyumbat kran demokrasi. Demokrasi Pancasila pun menemui kegagalannya dan berakhir.

Bersamaan dengan kompetisi dunia menumbuhkan kembali semangat demokratisasi. Pengalaman sejarah mengajak Indonesia mencoba menggunakan “Demokrasi terbuka”. Tahun 1998 merupakan babak keempat sejarah demokrasi di Indonesia dimulai, sebuah transisi demokrasi.

Menerapkan demokrasi terbuka untuk realitas Indonesia sesungguhnya merupakan perhitungan politik yang cukup berani, mengingat rakyat pada umumnya belum memahami secara memadai apa itu demokrasi. Demokrasi berjalan tanpa arah dan tidak ada yang mampu mengendalikan. Masing-masing kelompok menyuarakan demokrasi berdasarkan kepentingannya sendiri (Kholid O. Santoso, 2006 : 11).

Di tengah demokrasi “terbuka” kondisi Indonesia semakin ambruk di semua sektor kehidupan. Kali ini penyelenggaraan demokrasi gagal karena tidak saja tidak dapat membendung kecenderungan rezim penguasa, tetapi juga terlalu hanyut dalam emosi massa rakyat. Semua itu telah membuat kenyataan pahit bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak seindah ketika demokrasi itu diteorikan.

Selain dari konsep demokrasi di atas, ada satu konsep demokrasi lagi di Indonesia yang belum pernah dilaksanakan. Yaitu konsep demokrasi Muhammad Hatta. Atau yang lebih populer dengan sebutan Bung Hatta. Menurut Bung Hatta (2008:122) Negara Indonesia haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dipahamkan harus bersifat kolektivisme bukan individualisme seperti yang dipropagandakan J.J Roesseau. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya dibidang politik, tapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Kalau tidak seperti itu kedaulatan belum tercapai karena belum ada persamaan dan persaudaraan. Oleh sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Dan semangat demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial dan kolektif. Dalam implementasinya Bung Hatta menjabarkan, untuk bidang politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Dalam segi ekonomi semangat gotong royong yang merupakan koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat. Dalam segi sosial diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia sejahtera menjadi tujuan bernegara.

Selanjutnya dalam tulisannya yang berjudul “Kebangsaan dan Kerakyatan”, Bung Hatta (2008: 34) mencontohkan Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang berdasarkan individualisme tidak berhasil mencapai kerakyatan yang sesungguhnya. Melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Ini karena perjuangannya tidak berdasarkan semangat kolektivisme. Walaupun dalam trilogy semboyan mereka “Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan ” kedua dasar itu dicantumkan. Dalam beberapa tulisannya dan pidato-pidatonya Bung Hatta selalu mengulang kembali pendapatnya tentang kedaulatan rakyat yang tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Kedaulatan rakyat Indonesia yang harus bersemangat kolektivisme bukan individualisme yang dipropagandakan bangsa barat.

Setelah tiga bentuk demokrasi di tegakan di Indonesia dan masing-masing berakhir dengan tragis. Dan di tengah hiruk pikuknya perjalanan demokrasi di Indonesia kita kembali mengkaji pemikiran para pendahulu terutama para pendiri negeri ini tentang demokrasi beserta aplikasinya di Indonesia. Mungkin kiranya cukup relevan jika kita kembali mengkaji apa yang telah di sumbangkan oleh Muhammad Hatta tentang demokrasi khususnya tentang demokrasi ekonomi di Indonesia yang dapat menjadi pilihan dimasa sekarang dan masa akan datang. Apalagi pemikiran dan gagasan beliau cukup orisinal yang menghendaki demokrasi ekonomi yang sesuai dengan bangsa Indonesia bukan demokrasi Barat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan mengarahkan penulis pada beberapa pokok kajian yaitu:

- a. Bagaimana konsep demokrasi ekonomi menurut Muhammad Hatta?
- b. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menurut Muhammad Hatta?
- c. Bagaimana tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap konsep demokrasi ekonomi Muhammad Hatta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara lain:

- a. Untuk mengetahui konsep demokrasi ekonomi Muhammad Hatta;
- b. Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Muhammad Hatta; dan
- c. Untuk mengetahui tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap konsep demokrasi ekonomi Muhammad Hatta.

Adapun kegunaan penelitian ini:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang siyasah (kenegaraan). Juga menjadi titik tolak bagi dunia akademis yang lebih mendalam baik terhadap tokoh yang sama maupun tokoh lainnya. Serta menambah khazanah keilmuan bidang kenegaraan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan bangsa, terutama yang berkaitan dengan demokrasi, yang bisa dijadikan alternative di samping konsep demokrasi yang sudah ada. Disamping itu dengan memahami pemikiran demokrasi Muhammad Hatta, diharapkan masyarakat dapat lebih dewasa dalam urusan kenegaraan dan menambah wawasan dan khazanah keilmuannya.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Ajaran Islam sangat mengutamakan sekali pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian perkara dan pengambilan keputusan. Karena dalam musyawarah mengandung nilai bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kebebasan mengemukakan pendapatnya tanpa memandang status sosial dan jabatan. Karena itulah Islam mengenal Majelis Syuro.

Dalam masyarakat modern, permusyawaratan dalam sebuah negara di kenal dengan istilah demokrasi. Istilah ini berasal dari Negara Barat yang berarti pemerintahan rakyat melalui perwakilan atau parlemen. Dengan kaa lain, Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Kedaulatan di dalam demokrasi Indonesia itu bersumber pada UUD 1945. Ada tiga teori kedaulatan dalam UUD 1945.

1. Kedaulatan Tuhan. Terdapat pada UUD 1945 alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa....”.
2. Kedaulatan rakyat. Terdapat pada pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
3. Kedaulatan hukum. Terdapat pada bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24: (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Yusuf Al Qordawy (1999:192 ) seorang ulama moderat, berpendapat bahwa sendi sendi-sendi demokrasi itu dicanangkan oleh Islam. Adapun selanjutnya diserahkan kepada ijihad orang-orang muslim sesuai dengan daar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Dan tidak ada salahnya bagi umat islam untuk mengambil pelajaran dari system demokrasi, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan syura, menghormati hak-hak manusia, menghadang para tiran di muka bumi.

Adapun, jika ada orang yang menolak demokrasi dengan anggapan bahwa karena demokrasi itu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang berarti menolak anggapan kedaulatan hukum itu ditangan Allah. Menurut Yusuf Al Qordhawy (1999:195) anggapan seperti itu tidak bisa diterima. Karena yang dimaksud kedaulatan Allah untuk menetapkan hukum bagi makhluk sudah jelas dan diyakini, yang meliputi dua macam:

1. Kedaulatan hukum berdasarkan takdir. Allah yang menciptakan alam, menangani segala urusan yang berjalan di dalamnya, menetapkan sunnah-sunnahnya yang tidak bisa diubah.
2. Kedaulatan menetapkan hukum yang diperintahkan, yaitu berupa pembebanan, perintah, larangan, keharusan dan pilihan yang tercermin dengan diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Dengan kedaulatan ini dia menetapkan hukum-hukum syariat, mewajibkan yang wajib, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

Lain lagi dengan pandangan demokrasinya Abu A'la Al Maududi, teorinya tentang demokrasi kelihatan “ekstrim”. Menurut Maududi (1996:19-21) yang dikutip Amien Rais, kedaulatan (souverenitas) ada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Alasannya kedaulatan seringkali menjadi kata-kata kosong, karena partisipasi rakyat dalam pemerintahan di kebanyakan Negara modern hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilihan umum. Setelah itu kendali pemerintahan dipegang sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan Negara. Dan sebagaimana mereka *vested interests* mereka sendiri. Disamping itu penolakan Maududi terhadap demokrasi juga karena pemahamannya terhadap ayat-ayat Al Quran yang menunjukkan bahwa otoritas dan souverinitas tertinggi adalah di tangan Tuhan.

Nurcholis Majid (1999:196-199) menuliskan pendapatnya tentang demokrasi dalam buku “Cita-Cita Politik Dalam Era Reformasi”, menurutnya kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu kedaulatan rakyat tidak cukup di bidang politik saja, tapi juga di



bidang lain khususnya bidang ekonomi diharapkan dapat mencapai keadilan sosial yang menjadi tujuan sebenarnya kita bernegara.

Di bagian lain dari bukunya yang sama Nurkholis (1999:144-145) menuliskan bahwa walaupun perlambang demokrasi ialah pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara yang rahasia, tetapi demokrasi tidaklah “bersemayam” dalam pemilu-pemilu. Jika menurut pemahaman di negara maju, demokrasi harus punya rumah, maka rumahnya ialah *civil society* atau masyarakat madani.

Dalam tulisannya Muhammad Hatta (2008:26) menuliskan bahwa “Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu rakyat memerintah diri sendiri”. Hatta juga mengungkapkan bahwa cara mengatur pemerintah negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dan bangsa. Kedaulatan rakyat tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi.

Lebih jauh Hatta dalam tulisannya “Kerakyatan” dalam buku “Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran”(Kholid O. Santoso, 2006:56) menjelaskan demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.

Sejarah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan hidupnya. Seperti kata pepatah Minangkabau “*Indak lakang dek paneh, indak lapuk dek ujan*” Adapun demokrasi asli yang ada di desa-desa Indonesia Menurut

Muhammad Hatta (2008:115) mempunyai tiga sifat utama yang harus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia merdeka, Yaitu:

*Pertama:* Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput dari tindasan yang berbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang berbagai urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

*Kedua:* Cita-cita masa protes, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun diatas pundak desa-demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tidak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka dan berkumpul.

*Ketiga:* Cita-cita tolong-menolong! Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitet. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak pernah membayar tukang atau menggaji kuli untuk menolong dia. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang orang sedesa. Disini tersimpan dasar perekonomian-berkoperasi.

Dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi yang begitu kuat hidupnya adalah pula dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin daripada otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cermin daripada pemerintah yang diperintah.

Selanjutnya Hatta (2008:25) juga menjelaskan kedaulatan rakyat yang ditawarkannya berbeda dengan demokrasi Barat atau demokrasi rumusan Rousseau, demokrasi Indonesia harus berdasarkan kemasyarakatan yang menjadi tiang persekutuan bangsa Indonesia sejak zaman purbakala. Dan demokrasi semacam itu menurut Hatta sudah ada pada pemerintahan desa.

Disini sangatlah jelas sekali, bahwa Hatta sangat memperhatikan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dalam karangannya yang terkenal yaitu “Demokrasi Kita”. Di sana Hatta mengemukakan bahwa cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial dan semangat demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial dan kolektif.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitaian**

Dalam upaya menghasilkan secara maksimal dalam penelitaan ini, metode penelitaan yang digunakan adalah penelitaan konten analisis atau disebut analisis isi, ini biasa digunakan dalam penelitaan komunikasi, namun dapat digunakan juga dalam penelitian yang bersifat normative (Cik Hasan Bisri, 1998:58).

Dalam penelitian metode analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsipnya di Indonesia menurut Muhamad Hatta.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang demokrasi ekonomi menurut Muhammad Hatta
- b. Data tentang prinsip-prinsip Demokrasi ekonomi menurut Muhammad Hatta

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang di ambil dari karya-karya yang menguraikan hal-hal yang sesuai dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut yaitu:

1. *Demokrasi kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat*
2. *Kumpulan karangan Muhammad Hatta Jilid 1-4*
3. *Satu Abad Bung Hatta Demokrasi kita, bebas aktif, ekonomi masa depan*

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang diambil dari karya-karya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitain normative yang bersumber dari bahan bacaan, dilakukan dengan study kepustakaan (*book survey*) yang releven dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis isi. Dalam pelaksanaan analisis data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasi seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian
- c. Mengorelasikan data-data yang sudah diklasifikasi dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang di analisis.

